

LAMPUNG PARLIAMENT WATCH (LPW)



POLA MONEY POLITICS

KONTROVERSI PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG

Editor :
Nanang Trenggono
Syarif Makhya



PENERBIT UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG 2003

Perpustakaan NasionalRI, Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Nanang Trenggono dan Syarif Makhyu

Pola money Politics

Kontroversi Pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008
Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2003
xiv, 203 halaman 14,5 x 21 cm

ISBN 979-8287-48-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Penulis

Penerbit Universitas Lampung
Cetakan Pertama: Februari 2003

PENGANTAR

Secara umum, tujuan diterbitkan buku ini adalah ingin menggambarkan pola *money politics* yang terjadi dalam proses pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008. Peristiwa politik penting untuk memilih pemegang pemerintahan Lampung tertinggi yang pertama sejak gerakan reformasi menjatuhkan rezim otoritarian militeristik Orde Baru. Secara khusus, buku ini lebih diarahkan untuk mengungkapkan berbagai pola permainan politik yang melibatkan aktor-aktor politik, antara lain para kandidat gubernur, anggota DPRD, pengurus partai politik dan berbagai pihak yang berperan aktif dalam pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini ditunjukkan pula pemikiran, cara, forum, dan instrumen yang digunakan untuk melakukan *money politics*.

Latar belakang para penulisnya beranekaragam, antara lain akademisi, pengacara, aktivis dan jurnalis profesional. Oleh sebab itu, kumpulan karangan ini memiliki karakter tersendiri, baik isi maupun gaya penulisan. Bila dicermati secara keseluruhan berbagai perspektif tertuang dalam buku ini, yakni pendekatan hukum, ekonomi politik, struktural fungsional, etika, dan analogi. Meskipun dalam tulisan masing-masing kesemuanya dituangkan secara ringkas.

Sama dengan ciri bunga rampai pada umumnya, dari satu tulisan ke tulisan lain bisa saja terjadi pengulangan-pengulangan. Meskipun demikian, kumpulan karangan ini disistematisasi sedemikian rupa sehingga memudahkan pembaca untuk mengambil kesimpulan. Secara keseluruhan kerangka buku ini dibagi dalam enam bagian termasuk kesimpulan.

Pertama, tiga penulis langsung berbicara tentang perilaku korup, yakni permainan *money politics* yang terjadi pada semua tahapan pemilihan gubernur. Kedua, dua penulis menampilkan praktik politik uang dari ekspose media massa khususnya media cetak, yang disertai *content analysis* terhadap netralitas media harian utama di Lampung dalam mensikapi suksesi. Ketiga, menguraikan tentang keterbatasan dan kelemahan hukum untuk menjerat *money politics* yang secara formal dikategorikan sebagai tindak pidana suap. Disertai pula dengan solusi alternatif dan pilihan hukum untuk mengantisipasi praktik *money politics*. Keempat, satu tulisan khusus mengenai prediksi

Secara umum, tujuan diterbitkan buku ini adalah ingin menyampaikan kepada pembaca tentang politik uang dalam pemilihan umum. Buku ini membahas politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Buku ini membahas politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Buku ini membahas politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Buku ini membahas politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Buku ini membahas politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia.

Pengantar: Bambang Eka Wijaya

LAMPUNG PARLIAMENT WATCH (LPW)

Editor:

Nanang Trenggono

Syarief Makhya

Pertama, dua penulis langsung berbicara tentang perilaku
korup, yakni permainan *money politics* yang terjadi pada semua
bahasan pemilihan gubernur. Kedua, dua penulis menampilkan
praktik politik uang dari ekspose media massa khususnya me-
dia cetak, yang disertai *content analysis* terhadap netralitas media
harian utama di Lampung dalam mengungkap praktik politik uang
menggunakan tentang keterbukaan informasi publik. Ketiga, untuk
mendukung analisis, penulis menyajikan data statistik formal dikategorikan
sebagai *money politics* dan *money politics* alternatif
dan *money politics* alternatif. Keempat, penulis menampilkan praktik *money poli-*
tics. Kelima, satu tulisan mengupas khusus mengenai prediksi

POLA MONEY POLITICS
KONTROVERSI PEMILIHAN
GUBERNUR LAMPUNG
2003-2008

REALITAS MONEY POLITICS DALAM RETORIKA TRANSISI POLITIK DEMOKRATISASI

Oleh: Nanang Trenggono

"Suara hati, suara hati, kenapa pergi" (Iwan Fals)

Dinamika politik pasca kejatuhan Presiden Soeharto 21 Mei 1998 diwarnai oleh kompleksitas demokratisasi. Dalam hal ini adalah transformasi dari politik otoritarian militeristik Orde Baru (Orba) menuju demokratisasi politik, yang ditengahi krisis ekonomi, telah memunculkan dua istilah yakni: reformasi dan transisi demokratisasi. Dua istilah ini tidak bebas nilai dan mempunyai konotasi yang berbeda. Istilah reformasi sering dipakai untuk menunjukkan semangat perubahan yang "revolusioner" menuju tatanan baru yang konstruktif. Penggunaan istilah reformasi sering kali diletakkan dalam konteks dan anggapan yang membedakan antara masa Orba yang diktator, suram, otoriter, tertutup, militeristik dan keburukan-keburukan lainnya dengan kondisi baru yang diinginkan serta dibayangkan bersifat demokratis, emansipatif dan terbuka.

Sedangkan istilah transisi demokratisasi, sering digunakan pada saat wacana reformasi menghadapi problem serius, menemui kendala yang menyulitkan gerakan reformasi itu sendiri. Seperti perilaku buruk elite partai politik baik yang ada di lembaga legislatif maupun yang menjadi pengurus partai politik, serta birokrasi yang masih korup ibarat keranjang sampah. Untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang berjalan bersamaan dengan proses reformasi politik di segala bidang, sering kali digunakan istilah atau retorika—apologis—transisi politik demokratisasi. Namun, dalam kalimat ini tetap konsisten

¹ Penulis adalah Staf Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Peserta Program Doktor Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, dan Aktifis LPW.

sepenuhnya kepada Allah Swt. Untuk mewujudkan kekuasaan yang diperoleh dengan cara yang halal itu, maka perlu ditinjau ulang tentang pemilihan kepala daerah dengan sistem perwakilan, pola rekrutmen calon, dan aturan main pemilihan.

Sistem pemilihan langsung sekarang sudah menjadi wacana sebagai alternatif yang paling baik untuk melakukan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat. Dengan cara ini, kemungkinan terjadinya politik uang dapat diminimalkan, sekaligus menunjukkan siapa yang sebenarnya dikehendaki rakyat. Pola rekrutmen calon yang terbuka, memberikan kesan bahwa calon-calon yang memiliki kepentingan untuk memperoleh dukungan politik dari fraksi-fraksi di DPRD. Pola ini kemudian dimanfaatkan oleh anggota DPRD untuk melakukan praktik *money politics*. Rekrutmen calon seharusnya dilakukan oleh partai. Partailah yang memilih dan menentukan calon, untuk kemudian disosialisasikan kepada publik. Kalau partai yang memiliki kepentingan untuk mencari calon, maka sangat kecil kemungkinan terjadinya praktik *money politics*.

Aturan main pemilihan atau tatib pemilihan seharusnya tidak dimonopoli oleh DPRD. Dewan seharusnya memberikan ruang yang terbuka bagi publik untuk memberikan kritik, saran dan masukan-masukan dalam pembuatan tatib pemilihan. Jika tatib dimonopoli pembuatannya, maka yang terjadi tatib sarat dengan kepentingan-kepentingan politik fraksi-fraksi di DPRD.

DAFTAR BACAAN:

- Diskusi Panel. "Membangun Pondasi Good Governance Di Masa Transisi". 26 Januari 2000. *The Indonesian Society for Transparency*. Financial Club Jakarta.
- Makhya, Syarif. "PDIP dan Bias Kekuasaan". Catatan Tambahan atas Tulisan Eddy Rifai dan Wahyu Sasongko. *Lampung Post*. 27 Desember 2003.
- Widagdo, Badjoeri. "Menilai Pemimpin Kita". *Republika*. Jumat 22 Oktober 1999.